

Menegoisasikan Identitas: Politik *Unity in Diversity* dan Islamisasi Negara di Malaysia, 1969-2003

Suryawan Abdian Alim¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹E-mail: suryawanalim@gmail.com

Abstrack

This article discusses the changing dynamics of Malay politics in Malaysia in the period 1969-2003 by highlighting the implementation of *Unity in Diversity* politics as a national integration strategu after the May 13, 1969 racial riots. In this context, the state tried to balance ethnic and religious diversity through political and economic policies that emphasized social harmony, such as the New Economic Policy (NEP) and Islamization by the Mahathir Mohamad administration. This research uses a literature study method with a political history approach to analyze how Malay Islamic identity politics is formed and maintained within the framework of a multiethnic nation-state. Using Ralf Dahrendorf's conflict theory, this article shows that although *Unity in Diversity* is used as a formal framework to nurture plurality, social practices tent to reinforce the dominance of the ethnic majority and Islamic identity as a confirmation of power.

Keyword: Malaysia, Unity in Diversity, State Islamization, 1969

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika perubahan politik Melayu di Malaysia pada periode 1969-2003 dengan menyoroti penerapan politik *Unity in Diversity* sebagai strategi integrasi nasional pasca kerusuhan rasial 13 Mei 1969. Dalam konteks ini, negara berusaha menyeimbangkan keragaman etnis dan agama melalui kebijakan politik dan ekonomi yang menekankan pada harmoni sosial, seperti *New Economic Policy* (NEP) dan Islamisasi oleh pemerintahan Mahathir Mohamed. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dengan pendekatan Sejarah politik untuk menganalisis bagaimana politik identitas Islam Melayu dibentuk dan dipertahankan dalam kerangka negara-bangsa yang multietnis. Dengan menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, artikel ini menunjukkan bahwa meskipun *Unity in Diversity* dijadikan kerangka formal untuk merawat pluralitas, praktek sosial cenderung memperkuat dominasi etnis mayoritas dan identitas Islam sebagai pengukuhan kekuasaan.

Kata Kunci: Malaysia, *Unity in Diversity*, Islamisasi Negara, 1969

Pendahuluan/Introduction

Politik *Unity in Diversity* dan proses Islamisasi negara adalah dua dinamika utama yang membentuk wajah politik dan identitas nasional Malaysua pasca peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi kerusuhan rasial tersebut menjadi titik balik, memaksa pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan integrasi nasional dan memperkuat peran Islam dalam

kehidupan bernegara. Sejak saat itu, Malaysia berupaya menyeimbangkan angara pluralism etnis dan agana dengan aspirasi dominasi politik Melayu-Islam sebagai kelompok mayoritas (Ting, 2009: 37)

Pasca 1969, pemerintah Malaysia memperkenalkan berbagai kebijakan untuk memperkuat persatuan nasional, diantaranya: (1) pembentukan Barisan

Nasional sebagai koalisi partai lintas etnis, (2) Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada 1970 menandai upaya afirmatif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antara etnis Melayu dan non-Melayu (Sundaram, 2004), dan (3) Dalam konteks, politik identitas Melayu dan Islam mendapatkan legitimasi baru dalam bernegara di mana peran Islam dapat melaksanakan pemaknaan ulang Islam dalam modernisasi dan pembangunan negara (Noor, 2014: 127-130).

Dalam konteks pluralisme, konsep *Unity in Diversity* di Malaysia bukan hanya sekadar slogan, namun sebagai strategi kebijakan yang berusaha menyeimbangkan hak-hak komunitas non-Melayu dengan keistimewaan politik dan ekonomi etnis Melayu. Namun, dalam implementasinya sering kali menimbulkan pro dan kontra sebab dianggap lebih mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas dan memperlebar jarak sosial-ekonomi antar etnis (Noor, 2024).

Di sisi lain, proses Islamisasi negara semakin menguat sejak awal 1980-an, terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Kebijakan Islamisasi diwujudkan melalui berbagai langkah, seperti halnya pendirian institusi keuangan syariah, penguatan Pendidikan Islam, dan pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam administrasi negara dan sistem hukum. Langkah-langkah ini bukan hanya memperkuat identitas Islam di ruang public, tetapi juga memperdalam peran agama dalam politik dan birokrasi negara (Daulay, 2013: 143 & Ting, 2009: 34).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana slogan *Unity in Diversity* diberlakukan dalam praktek politik di Malaysia pasca 1969 dan bagaimana *policy* tersebut memperngaruhi perubahan arah politik Islam Melayu.

Pemilihan tahun 1969-2003 didasarkan atas di tahun 1969 sebagai pemberlakuan slogan *Unity in Diversity* pasca tragedy 1969 dan 2003 dipilih sebagai tahun terakhir Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia dimana di masanya “Islamisasi” gencar dilakukan. Dengan pendekatan sejarah politik, artikel ini akan melihat peran elite politik, komposisi pembangunan, dan narasi kebangsaan yang dikembangkan untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, serta mempertahankan dan memperkokoh dominasi politik etnis Melayu-Islam di Malaysia.

Metode Penelitian

Artikel ini membahas terkait perubahan politik Islam Melayu pasca penerapan *Unity in Diversity* merupakan sejarah politik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Sejarah yang terdiri atas tahap heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi (Abdurahman, 2011: 101). Tahap heuristik yaitu pengumpulan sumber-sumber Sejarah baik primer dan sekunder yang relevan. Setelah itu, dilakukan kritik atau verifikasi untuk menilai keaslian dan kredibilitas isinya. Tahap berikutnya adalah interpretasi, dimana dilakukan pemaknaan fakta-fakta yang telah diverifikasi dan tahap terakhir, historiografi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik yang digunakan untuk menganalisa bagaimana setelah ditetapkannya politik *Unity in Diversity* di Malaysia yang memiliki dampak besar terhadap perubahan politik bagi umat Islam khususnya etnis Melayu. Dan membicarakan tentang kerusuhan 13 Mei

1969 berdasarkan teori konflik Ralf Dahrendorf.

Menurut Dahrendorf (1959), masyarakat modern memiliki otoritas yang terlembaga, artinya kekuasaan ada pada posisi tertentu dalam struktur sosial, bukan pada individu. Di Malaysia, kelompok Melayu menguasai politik melalui Partai UMNO dalam koalisi Barisan Nasional, sementara kelompok Cina dan India lebih kuat di bidang ekonomi, tetapi kurang terwakili dalam politik (Milne & Mauzy, 1999: 42-43).

Kondisi ini menimbulkan ketegangan tersembunyi, yaitu konflik yang belum terlihat tapi sudah ada karena ketidakadilan sosial. Menurut Dahrendorf (1959: 160), konflik ini akan muncul jika kelompok yang kurang berkuasa sadar akan ketimpangan dan menuntut perubahan. Hal ini terjadi menjelang pemilu 1969, ketika partai oposisi seperti DAP dan Gerakan yang mewakili non-Melayu mendapat banyak suara dan mengancam dominasi UMNO.

Pembahasan (Discussion)

Politik Islam di Malaysia pasca Kemerdekaan hingga 1969

Politik Islam di Malaysia pasca kemerdekaan tahun 1957 hingga 1969 ditandai oleh dinamika antara kekuatan Islamisme dan nasionalisme yang diwujudkan dalam berbagai kelompok dan partai dalam membentuk identitas negara baru. Kelompok muda seperti Kesatuan Melayu Muda dan partai Islam seperti Hizbu al-Muslimin (1948) dan Pan-Malayan Islamic Party (1951) aktif, sementara kaum nasionalis diwakili oleh UMNO¹, yang menjadi partai penguasa saat itu (Renre, 2012: 85). Setelah UMNO

dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, perjuangan lebih mengarah pada negara sekuler. Tunku menegaskan bahwa Malaysia adalah negara sekuler, bukan negara Islam, agar semua agama mendapat tempat yang sama dan menghormati keberagaman etnis (Rahman, 1986: 25).

Dua kekuatan utama yang mewarnai politik Islam di Malaysia pada periode ini adalah UMNO dan PAS². UMNO, sebagai partai penguasa, pada awalnya lebih menonjolkan agenda nasionalisme Melayu dan bersifat pragmatis serta cenderung sekuler dalam pendekatan politiknya. Sebaliknya, PAS sejak awal berdiri membawa ideologi Islam yang jelas, menuntut penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara dan bermanfaat. Persaingan antara UMNO dan PAS menjadi ciri khas politik Islam Malaysia (Pratama, 2022: 60-61).

Pada masa ini, Islam di Malaysia lebih banyak diakomodasi pada tataran simbolik dan kebijakan substantif, seperti penerapan Islam sebagai agama negara dan pengakuan pengadilan syariat untuk urusan pribadi umat Islam. Namun, sistem hukum dan pemerintahan yang diadopsi tetap didominasi oleh warisan colonial Inggris, di mana hukum syariat hanya berlaku terbatas pada aspek keluarga dan warisan. Hal ini menimbulkan kritik dari PAS yang menilai Malaysia belum sepenuhnya menjadi negara Islam tanpa penerapan syariat secara utuh (Sahidah, 2011).

Selain itu, politik Islam di Malaysia pada masa ini tidak dilepaskan dari dinamika sosial-ekonomi dan pluralitas etnis. Kebijakan pemerintah yang mengakomodasi Islam sering kali juga

bertujuan memperkuat solidaritas Melayu dan menanggulangi kesenjangan antar etnis, terutama dalam konteks hubungan antara Melayu-Islam dan komunitas Cina serta India. Namun, pendekatan yang terlalu menonjolkan identitas Melayu-Islam juga menimbulkan perlawanan dari kelompok non-Muslim, sehingga pemerintah harus menjaga keseimbangan antara aspirasi Islamis dan realitas pluralism masyarakat Malaysia (Nurul Hasanah, 2022).

Puncak ketegangan politik dan etnis terjadi pada kerusuhan 13 Mei 1969, yang menjadi titik balik dalam Sejarah politik Malaysia. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pro-Melayu dan mempertegas peran Islam dalam kehidupan bernegara, yang kemudian berlanjut pada era kebangkitan Islam dan reformasi ekonomi pada decade berikutnya. Dengan demikian, periode pasca kemerdekaan hingga 1969 merupakan fase konsolidasi identitas Islam-Melayu dalam politik Malaysia, sekaligus menandai awal dari kompetisi Panjang antara kekuatan nasionalis dan Islamis yang terus mewarnai lanskap politik negara ini.

Tragedi 13 Mei 1969 dan Latar Belakangnya

Tragedi 13 Mei 1969 merupakan kerusuhan rasial yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, antara etnis Melayu dan Cina yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan kerusakan besar. Kerusuhan ini dipicu oleh ketegangan politik dan etnis yang memuncak setelah pemilihan umum pada 10 Mei 1969, di mana partai oposisi yang mayoritas didukung oleh etnis Cina, seperti DAP³

dan Gerakan⁴, memperoleh hasil yang sangat baik. Perayaan kemenangan oleh pendukung partai oposisi yang berlebihan dan disertai ejekan rasial terhadap orang Melayu memicu kemarahan kelompok Melayu (Kuswanto, 2024; Yanuardi, 2023 & Weiss, 2015: 12-15).

Latar belakang kerusuhan ini juga terkait dengan penurunan suara signifikan yang dialami koalisi pemerintah yang dipimpin oleh UMNO, meskipun tetap memenangkan pemilu. Pawai kemenangan yang dilakukan oleh partai oposisi menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan dan memasuki Kawasan Melayu Kampong Bahru dengan membawa spanduk bernada rasis yang menghina orang Melayu. Meskipun partai oposisi segera meminta maaf, UMNO merespons dengan mengadakan pawai tandingan yang dipimpin oleh Menteri Besar Selangor, Dato' Harun Idris, untuk menunjukkan kekuatan dan solidaritas Melayu (Tasropi, 2024).

Kerusuhan pecah ketika kabar beredar bahwa kelompok Melayu yang menuju pawai tandingan diserang di Setapak. Berita ini memicu kemarahan besar di kalangan orang Melayu, yang kemudian melakukan pembalasan dengan kekerasan terhadap kelompok Cina. Organisasi-organisasi Melayu seperti Gang Parang Terbang dan Gang Parang Panjang ikut bergabung dalam aksi balasan tersebut, sehingga kerusuhan meluas dengan perkelahian, pembakaran toko dan rumah di Kuala Lumpur (Tasropi, 2024).

Setelah kerusuhan 13 Mei 1969, pemerintah Malaysia mengumumkan "Darurat Negara" berdasarkan Pasal 150 Konstitusi. Semua kegiatan pemerintahan dipusatkan pada Dewan Operasional

Nasional yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Razak Hussein. Meskipun keteriban di Kuala Lumpur pulih setelah empat hari, kerusuhan masih berlangsung selama dua bulan. Pemerintah mengancam akan bertindak tegas terhadap kelompok militant Melayu yang menentang Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman.

Ketegangan etnis antara Melayu dan Cina semakin memburuk karena perbedaan ekonomi dan sentiment yang memicu kebencian. Sebelum 1969, politik Malaysia berjalan dengan sistem demokrasi konsosiasional, yaitu koalisi antar etnis yang dihargai Bersama. Namun, kerusuhan 1969 mengakhiri era tersebut dan beralih ke konsep "Unity in Diversity" (Persatuan dalam Keberagaman) (Lijphart, 1981: 150-157).

Penerapan *Unity in Diversity* di Malaysia

Pemerintah Malaysia menerapkan konsep "Unity in Diversity" atau persatuan dalam keragaman untuk mengatasi konflik antaretnis. Prinsip ini berarti perbedaan antar kelompok etnis dianggap memperkaya budaya Malaysia, sehingga setiap etnis diberi kesempatan mengembangkan budayanya masing-masing. Pemerintah percaya, masyarakat yang beradab hanya bisa terwujud jika masyarakat diberdayakan dan berpikir terbuka. Dengan *Unity in Diversity*, antar etnis diharapkan saling menghormati dan menghindari konflik. Setiap kelompok etnis juga diwakili secara proporsional dalam lembaga negara, sehingga mereka bebas menyampaikan ide dan mengembangkan budaya tanpa tekanan dari etnis lain (Samsul, 2010).

Setelah insiden 13 Mei, pemerintah membentuk Majelis Gerakan Negara (Mageran) guna mengendalikan situasi

darurat dan menata ulang struktur sosial-politik negara. Salah satu langkahnya adalah pembentukan Jabatan Perpaduan Negara pada 1 Juli 1969, yang mempunyai tugas pembinaan dan memelihara antar kelompok serta menangani isu-isu yang berkaitan dengan rekonstruksi masyarakat. Jabatan ini kemudian berkembang menjadi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri dan menjadi Lembaga utama dalam mengelola program integrasi nasional (Wei Chang, 2013: 174-177 & Saat, 2021: 570).

Selain kebijakan ekonomi melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB), pemerintah mengukuhkan Rukun Negara sebagai prinsip nasional untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan toleransi di kalangan rakyat. Rukun Negara menjadi pedoman dalam membina masyarakat majmuk supaya dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu, undang-undang seperti Akta Hasutan 1948 ditegakkan untuk mencegah penyebaran isu sensitive terkait agama, Bahasa, dan hak Istimewa etnis tertentu yang dapat memicu ketegangan (Peng Kee, 2017: 398).

Pada decade 1980-an dan 1990-an, berbagai Lembaga dan program baru didirikan untuk memperkuat *Unity in Diversity*, seperti KEMAS, RELA, dan Rukun Tetangga. Program-program ini melibatkan semua etnis dalam kegiatan sosial dan keamanan lingkungan, serta bertujuan membangun rasa kebersamaan di Tingkat akar rumput. Selain itu, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Sosial didirikan pada tahun 1990 untuk mengkoordinasikan berbagai Upaya integrasi sosial dan ekonomi (Peng Kee, 2017: 401).

Selama pemerintahan Mahathir Mohamad (1981-2003), fokus pada Pembangunan ekonomi dan modernisasi turut memperkuat narasi *Unity in Diversity*. Mahathir Mohamad mempromosikan dan menyebarluaskan konsep “Bangsa Malaysia” yang menekankan identitas nasional di atas identitas etnis, meskipun struktur politik dan ekonomi tetap mempertahankan Pembangunan berdasarkan kelompok etnis. Pendekatan ini berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan, namun integrasi sosial masih menjadi tantangan (Wei Chang, 2013: 177).

Politik dan sosial Malaysia pasca tragedy 13 Mei 1969 dipengaruhi oleh upaya membangun persatuan dalam keberagaman sebagai langkah penyelesaian konflik etnis yang memicu kerusuhan tersebut.

Perubahan Politik Islam Melayu Tahun 1969-2003

“University in Diversity” menjadi representasi penting dalam politik Islam di Malaysia pasca 1969, yang menandai pergeseran dari pendekatan politik Islam yang eksklusif menuju model yang lebih inklusif dan pluralistic. Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keharmonisan antar etnis dan agama, sehingga politik Islam tidak lagi berfokus pada dominasi kelompok mayoritas Melayu-Islam, tetapi juga mengedepankan prinsip penghormatan terhadap keberagaman sebagai landasan persatuan nasional (Wekke, 2016).

Bidang Politik dan Ekonomi.

Kerusuhan etnis tahun 1969 menjadi titik balik penting bagi UMNO sebagai partai politik yang mewakili Islam dalam pemerintahan Malaysia. Sebelumnya, UMNO lebih menekankan peran sebagai

pembela hak Melayu dan sistem pluralism. Namun, setelah 1969, UMNO mulai lebih fokus pada Islam. Tuntutan ekonomi dan budaya dari pendukung Melayu membuat UMNO memperkuat identitas dan solidaritas Melayu-Islam melalui symbol, wacana politik, dan kebijakan. Pemerintah dan UMNO menyadari pentingnya mengembalikan kepercayaan orang Melayu dan menciptakan keadilan sosial-ekonomi agar negara tetap stabil dan aman. Untuk itu, mereka meluncurkan program reformasi ekonomi yang menargetkan orang Melayu dan bumiputera lainnya, dengan tujuan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. Kebijakan ini dikenal sebagai Dasar Ekonomi Baru (DEB), yang memberikan hak khusus, kuota, dan subsidi untuk membantu meningkatkan ekonomi dan Pendidikan orang Melayu (Sundaram, 2004).

Untuk menjalankan DEB, pemerintah membuat Rencana Perspektif Garis Besar (OPP). Rencana ini bertujuan meningkatkan jumlah bumiputera di sektor industry dari 31% pada tahun 1970 menjadi 52% pada tahun 1990. Posisi bumiputera di Tingkat administrasi dan manajemen juga ditargetkan naik dari 22% menjadi 49%. Untuk mencapai itu, pemerintah memberikan beasiswa kepada bumiputera untuk belajar di dalam dan luar negeri. Sementara itu, jumlah pekerja etnis Cina dikurangi dari 60% menjadi 38%, dan beasiswa untuk etnis Cina dibatasi (Helmiati, 2007: 193).

Pada awal 1980-an, pemerintah Malaysia mengambil langkah konkret dalam mengembangkan ekonomi Islam dengan mendirikan Lembaga-lembaga keuangan syariah. Tahun 1983 diundangnya Islamic Banking Act yang memberikan dasar hukum bagi

operasional bank syariah. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) didirikan sebagai bank syariah pertama yang beroperasi secara resmi pada tahun yang sama. Selain itu, juga dibentuk Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip Islam (Guntoro, 2022: 122-123; Ghazali, 2019: 47-49; Mutalib, 1990: 194 & Musyafah, 2019: 425-426).

Selain perbankan, pemerintah juga mengembangkan instrument keuangan Islam lainnya seperti pegadaian syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan Yayasan ekonomi Islam. Usaha ini didukung dengan pembentukan kelompok sumber daya manusia khusus dan unit-unit penegakan Islam dalam pemerintahan yang bertugas mengawasi dan mengembangkan ekonomi Islam secara menyeluruh (Lukman, 2021: 82 & Nur Amalia & Irfan, 2021).

Pemerintah juga menyesuaikan sistem ekonomi nasional dengan prinsip larangan bunga (*riba*) dan keadilan sosial yang menjadi landasan ekonomi Islam. Sistem ini dirancang untuk memberikan alternatif yang adil dan berkelanjutan dibandingkan sistem kapitalis konvensional. Melalui kebijakan ini, Malaysia berusaha menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi syariah di Asia Tenggara, sekaligus menarik investasi dari negara-negara Muslim lain yang tertarik pada model ekonomi Islam (Chairunnisa, 2025: 53).

Meskipun DEB terutama fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi orang Melayu, promosi Bahasa dan budaya Melayu semakin memperkuat hubungan agama dan etnisitas. Dengan menekankan Bahasa Melayu, Sejarah, budaya, dan agama, rasa bangga dan solidaritas orang Melayu menjadi lebih kuat. Nasionalisme Melayu dan Islam, yang penting dalam

budaya Melayu, semakin menjadi kekuatan ideologi dan politik yang memperkuat peran Islam dalam politik Malaysia.

Bidang Pendidikan dan Budaya.

Pemerintah berusaha mempromosikan nilai-nilai Islam secara moderat dan terkontrol agar tidak menimbulkan ketegangan dengan kelompok non-Muslim. Sikap ini tercermin dalam pengaturan aktivitas keagamaan dan budaya Islam melalui Lembaga-lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah, seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Yayasan Dakwah Islamiah, yang berfungsi mengelola dan mengawasi dakwah serta pengembangan budaya Islam (Helmiati, 2007: 139 & Daulah, 2020).

Selain itu, pemerintah secara aktif mengembangkan program dakwah dan Pendidikan Islam berorientasi pada moderasi dan kemajuan. Yayasan Dakwah Islamiah dan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) menjadi pusat penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Program-program ini bertujuan membangun kesadaran Islam yang seimbang, menghindari ekstremisme, dan memperkuat solidaritas umat Islam tanpa mengabaikan keberagaman etnis dan agama di Malaysia. Pendekatan ini membantu menjaga keharmonisan sosial sekaligus memperkuat budaya Islam sebagai bagian integral dari identitas nasional (Wekke, 2016 & Daulay, 2020).

Sebagai kelompok etnis terbesar di Malaysia, orang Melayu yang beragama Islam memiliki pengaruh besar dalam politik negara. Pemerintah memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Kebijakan ini tidak hanya dalam

Pembangunan fisik, tapi juga dalam aspek sosial dan budaya. Sikap ini semakin kuat saat pemerintahan Mahathir Mohamad, yang menunjukkan dukungan serius terhadap peran Islam. Pemerintah bahkan menjalankan program “Islamisasi” dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat (Nurhasanah, 2009).

Pemerintah Malaysia menunjukkan keseriusannya dalam mendukung Islam dengan membangun berbagai infrastruktur penting, seperti masjid, Sekolah Guru Islam, serta menyediakan dana besar untuk pelatihan guru agama dan Yayasan dakwah. Melalui kebijakan DEB, pemerintah juga berfokus meningkatkan pendidikan bagi masyarakat Melayu dan mendorong kesadaran Islam yang semakin berkembang, dikenal sebagai kebangkitan Islam (*Islamic Resurgence*). Selain itu, Lembaga seperti Yayasan Dakwah Islamiyah didirikan untuk mengkoordinasikan kegiatan dakwah, meningkatkan kualitas dakwah, dan memperkuat perjuangan Islam di Malaysia, sebagai bagian dari Upaya memperkuat syiar Islam di berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim (Helmiati, 2007: 198-200).

Perbaikan pendidikan Islam di Malaysia banyak dilakukan sebagai respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat Islam dan tekanan dari organisasi pelajar Muslim, ulama, guru, serta ahli pendidikan Islam. Misalnya, upaya pemerintah mengubah Pendidikan tinggi Muslim menjadi Fakultas Studi Islam di Universitas Nasional Malaysia muncul dari perdebatan antara pendukung universitas nasional dan universitas Islam pada akhir 1960-an. Selain itu, keinginan pemerintah mendirikan Universitas Islam

Internasional juga dipengaruhi oleh tuntutan para pemimpin dan cendekiawan Islam sejak tahun 1960-an (Abdullah, 1998: 430).

Bidang Hukum.

Mulai memperkuat hukum Islam sebagai bagian dari kebijakan politik Islam yang bertujuan memperkuat identitas Melayu-Islam dan menjaga stabilitas sosial. Pemerintah membentuk beberapa komite untuk menelaah struktur, yuridiksi, wewenang Pengadilan Syariah, serta merekomendasikan penyeragaman undang-undang hukum keluarga Islam di seluruh negara bagian. Hasilnya, sejumlah undang-undang administrasi hukum Islam mulai diberlakukan, seperti Undang-Undang Administrasi Pengadilan Kelantan (1982) dan Mahkamah Syariah Kedah (1983), yang memperkuat posisi pengadilan syariah dalam sistem hukum nasional (Rini, 2016: 129).

Konstitusi Malaysia secara resmi menetapkan Islam sebagai agama negara dan memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam, khususnya bagi komunitas Melayu Muslim. Namun, pelaksanaan hukum Islam di Malaysia bersifat kontekstual dan pluralistik, mengakomodasi keberagaman agama dan suku bangsa. Hukum Islam terutama diterapkan dalam bidang hukum keluarga dan perdata Islam, sementara hukum pidana dan perdata tetap menggunakan sistem *common law* (Makatunggang, 2003 & Surawardi, 2005).

Pada decade 1980-an, pemerintah semakin intensif mengembangkan legislasi hukum Islam dengan modernitas. Pengundangan hukum Islam di wilayah Federal Territory pada 1984 menjadi tonggak penting yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat

hukum Islam secara formal. Namun, pemerintah juga berusaha mengendalikan proses legislasi agar tetap moderat dan tidak menimbulkan ketegangan dengan kelompok non-Muslim maupaun kelompok Islam radikal (Riza, 2013).

Selain legislasi, pemerintah juga mengatur aktivitas dakwah dan keagamaan melalui kebijakan keamanan seperti *Internal Security Act* (ISA) yang membatasi kegiatan keislaman yang dianggap radikal. Kegiatan dakwah hanya boleh dilakukan oleh institusi yang mendapat izin resmi dari pemerintah. Kebijakan ini bertujuan meredam potensi konflik dan menjaga keharmonisan antar etnis dan agama di Malaysia. Meski demikian, pengamalan nilai-nilai Islam di masyarakat makin kuat dan mendapat dukungan pemerintah secara bertahap (Pratama, 2022).

Pelembagaan hukum Islam di Malaysia juga mendapat dukungan historis dan yuridis yang kuat, terutama melalui amandemen konstitusi tahun 1988 yang memperkuat kewenangan Mahkamah Syariah dan raja-raja bagian dalam mengatur hukum Islam. Dukungan politik negara ini penting untuk legitimasi hukum Islam dan memastikan keberlanjutan penerapannya dalam sistem hukum nasional. Namun, hubungan antara negara dan hukum Islam bersifat symbiosis mutualistic, di mana hukum Islam berkembang seiring dengan dukungan politik yang strategis dari pemerintah (Lahaji, 2023).

Bidang Kebijakan Luar Negeri.

Seiring perubahan kebijakan dalam negeri terhadap Islam, kebijakan luar negeri Malaysia juga mengalami perubahan besar. Salah satu perubahan itu adalah sikap pemerintah yang semakin berpihak

kepada Dunia Muslim. Sepanjang tahun 1980-an, pemerintah berupaya menempatkan diri sebagai bagian dari actor Dunia Muslim. Melalui berbagai pidato dalam pertemuan dengan negara-negara Islam, terlihat bahwa pemerintah - khususnya Mahathir- menunjukkan perhatian besar terhadap Islam dan isu-isu umat. Dalam pidatonya di Konferensi Organisasi Negara Islam di Jeddah, Saudi Arabia, tahun 1981, Mahathir menyuarakan supata negara-negara Muslim mengubah slogan mereka menjadi tindakan nyata, bukan hanya retorika atau resolusi (Helmiati, 2007: 153).

Isu-isu internasional yang melibatkan umat Islam, seperti konflik di Timur Tengah dan posisi Muslim sebagai minoritas di Kawasan lainnya, sering menjadi wadah diplomasi public Malaysia. Pemerintah secara aktif menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Muslim di Palestina, Bosnia, dan Afghanistan, serta menentang intervensi asing yang dianggap merugikan. Sikap ini mempertegas posisi Malaysia dengan kepentingannya di dunia Islam di forum internasional (lihat Nair,1997).

Reaksi non-Muslim terhadap “Islamisasi Negara”.

Membuat kelompok non-Melayu dan non-Islam menerima kebijakan “Islamisasi”, pemerintah Malaysia, terutama Mahathir Mohamad, menekankan bahwa nilai-nilai Islam seperti bersih, jujur, adil, disiplin, Amanah, dan cakup adalah nilai universal yang dapat diterima semua kalangan. Contohnya, pemerintah memperbarui sistem ekonomi Malaysia dengan menghapuskan bunga dalam transaksi keuangan, dan meyakinkan bahwa sistem ekonomi Islam tetap menguntungkan

semua pihak. Secara umum, non-Melayu dan non-Islam tidak keberatan dengan program Islamisasi selama tidak merugikan memprotes. Misalnya, pada April 1992, ketika PAS ingin memberlakukan hukum *hudud*⁵ untuk semua, DAP dan MCA⁶ menolaknya karena dianggap mengganggu kebebasan beragama non-Islam (Helmiati, 2007: 299-302).

Selain itu, kebijakan Islamisasi yang diusung oleh UMNO sering dianggap bersifat ambil-ave. Pemerintah berusaha menyeimbangkan antara memperkuat legitimasi politik dengan basis Melayu-Muslim dan menjaga stabilitas hubungan antar etnis. Namun, sikap waspada pemerintah terhadap kelompok Islamis yang dianggap radikal juga membuat ketegangan tersendiri, kerana beberapa kelompok dakwah Islam justru dibatasi dan diawasi ketat. Hal ini menunjukkan bahwa Islamisasi yang diterapkan bukanlah Islamisasi total, melainkan sebuah kebijakan yang dikontrol ketat demi menjaga keseimbangan sosial-politik (Andri, 2022).

Politik Malaysia yang berbasis etnis dan agama juga memperlihatkan bahwa non-Muslim memiliki partai politik sendiri seperti MCA dan MIC yang berperan sebagai perwakilan mereka dalam koalisi Barisan Nasional. Namun kebijakan Islamisasi yang semakin menguat menjadikan posisi partai-partai ini terkadang menjadi kurang dominan dalam pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan agama dan identitas nasional. Hal ini menimbulkan perasaan ketidakpuasan dan ketidaksetaraan di kalangan non-Muslim, yang merasa suara mereka kurang diapresiasi dalam konteks kebijakan yang semakin Islamis (Andri, 2022).

mereka. Namun, jika ada kebijakan yang dianggap merugikan atau membatasi kebebasan mereka, mereka akan

Kesimpulan/Conclusion

Malaysia adalah sebuah negara dengan realitas masyarakat yang plural, terdiri atas beragam etnis, agama, bahasa, dan budaya. Dominasi politik etnis Melayu-Islam dan keterlibatan signifikan etnis Cina dan India dalam sektor ekonomi menciptakan dinamika yang kompleks, yang menuntut adanya penyelesaian dan kebijakan yang inklusif. Kondisi tersebut sesuai dengan teori konflik Dahendorf, di mana kelompok minoritas di Malaysia menuntut adanya perubahan dan penyeimbangan di tengah menguatnya dominasi kelompok Melayu-Islam. Perubahan mulai terjadi pasca 1969 melalui penerapan *Unity in Diversity*. Kebijakan ini bukan hanya membuka ruang yang lebih proporsional, melainkan juga menjadi titik balik penerapan nilai-nilai Islam dalam politik dan pembangunan nasional. Kebijakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) memperlihatkan negara berusaha menyeimbangkan kepentingan etnis.

Daftar Pustaka/bibilography

BOOK

- Abdullah, Taufik & Sharon Siddique (ed.). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press, 1959.
- Helmiati. *Islam dalam Masyarakat & Politik Malaysia*. Pekanbaru: Suska Press, 2007.

- Lahaji. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia & Malaysia*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2023.
- Lijphart, Arend. *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*. New Haven: Yale University Press, 1981.
- Milne, R. S. & Diane K. Mauzy. *Malaysian Politics under Mahathir*. London: Routledge, 1999.
- Mutalib, Hussin. *Islam and Ethnicity in Malay Politics*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1990.
- Nair, Shanti. *Islam in Malaysian Foreign Policy*. London: Routledge, 1997.
- Noor, Faris A. *The Malaysian Islamic Party 1951-2013*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 2014.
- Rahman, Tunku Abdul. *Contemporary Issues on Malaysian Religions*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 1986.
- Weiss, Meredith L. *Routledge Handbook of Contemporary Malaysia*. New York: Routledge, 2015.

JOURNAL ARTICLE

- Andri, Adetia. UMNO dan PAS dalam Persaingan Politik Sekuler-Islam di Malaysia. *Warisan*. 2022. Vol. 3, No. 2, 74-81.
<https://doi.org/10.34007/warisan.v3i2.1631>
- Chairunnisa, C., & Sapa, N. B. Transformasi Ekonomi Islam Pasca Kolonial : Periode 1960-1980. *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 2025. 10(1), 44.
<https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i1.6500>
- Daulay, Hamdan. "Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia (Dari Wacana Syariat Islam hingga Konsep Islam Hadhari)" *Asy-Syir'ah* Vol. 47, No. 1, Juni 2013: 141-168.

- <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.60>
- Daulay, Hamdan & Nor Suzyilah binti Sohami. "Dinamika Dakwah dan Politik Islam di Malaysia (Kajian Manajemen Dakwah dan Politik Partai Islam PAS) *Tadbir* Vol. 2, No. 1 2020: 1-22.
<https://doi.org/10.24952/tad.v2i1.2482>
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2011. 4(1), 44-55.
<https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>
- Guntoro, Satriak & Ahmad. Dinamika dan Problematika Ekonomi Syariah di Negara Islam. *Syarikat*, Vol. 5 No. 2 (2022): 120-127
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10044](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10044)
- Lukman. "Islamic Economic Thinking for The Period 1980-2000". *El-Idarah* 7(2), 2021: 81-87.
<https://sys.parahikma.ac.id/journal/index.php/el-idarah/article/view/224>
- Nur Amalia, G., & Irfan Saefuloh. SEJARAH PERADABAN EKONOMI ISLAM DI MALAYSIA. *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora*, 2021. 1(2), 137-150.
<https://doi.org/10.61612/jpn.v1i2.29>
- Nurhasanah. "Politik Kebijakan Islamisasi Mahathir" *Dialog*, 32(2), 2017: 65-77. <https://doi.org/10.47655/dialog.v32i2.142>
- Nurul Hasanah. Kebijakan Politik United Malay National Organization (UMNO) dalam Perkembangan Islam di Malaysia 1981-2003 M: Political Policy of the United Malay National Organization (UMNO) in the Development of Islam in

- Malaysia 1981-2003 AD. *Journal of Islamic History*, 2022. 2(2), 158-176. <https://doi.org/10.53088/jih.v2i2.434>
- Makatunggang, Ramli. "Penerapan Hukum Islam di Malaysia". *Al-Syir'ah* Vol. 1, No. 1 2003: 1-13. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v1i1.186>
- Musyafah, A. A. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN ISLAM DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA. *Diponegoro Private Law Review*, 2019. 3(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Peng Kee, Chang & Suet Nie, Kho. A Reflection of National Integration Process and the Role of Media in Malaysia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*. 2017. 33. 395-405. 10.17576/JKMJC-2017-3301-26.
- Pratama, F. S. PERKEMBANGAN DAN IMPLIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK ISLAM DALAM KEHIDUPAN PLURALISME MALAYSIA. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 2022. 26(2), 56-66. <https://doi.org/10.37108/tabuah.v26i2.801>
- Renre, A. Perkembangan Islam di Malaysia (Suatu Tinjauan Sosio Historis). *Jurnal Adabiyah*, 2012. 12(2), 203-216. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/1720>
- Rini, Yufi Wiyos. "Politik (Legislasi) Hukum Islam di Malaysia" Asas Vol. 8 No. 1 2016: 122-138. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1275>
- Riza, A. K. Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Malaysia. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2013. 3(2), 124-147. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2013.3.2.124-147>
- Saat, Ishak, Mohd Kasri Saidon, Ahmad Zainuddin Husin & Ruhaizan Sulaiman. . Historical Elements and National Unity in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 2021. Vol. 11, No. 11, 569-581 <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i11/11556>
- Sahidah, A. Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara yang Unik. *Millah: Journal of Religious Studies*, 2011. 10(2). <https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art2>
- Surawardi, S. HUKUM ISLAM DI MALAYSIA. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 3(2), 2019. 217-231. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v3i2.3171>
- Ting, Helen. "The Politics of National Identity in West Malaysia: Continued Mutation or Critical Transition?" *Southeast Asian Studies*, Vol. 47, No. 1, June 2009: 31-52. <https://kyoto-seas.org/wp-content/uploads/2012/01/470102.pdf>
- Wekke, I. S. POLITIK, AGAMA DAN NEGARA: PEMERINTAHAN ISLAM DI MALAYSIA. *Millah: Journal of Religious Studies*, 2016. 12(2), 291-328. <https://doi.org/10.20885/millah.volxii.iss2.art1>
- Wei Chang, Lee., Baharuddin Azizan & Muhamamd Amran. National Unity at the University Level: Importance of Civilisational Dialogue and Way Forward. *European Scientific Journal* December 2013. Vol. 4, 173-186.

<https://core.ac.uk/download/pdf/236407467.pdf>

Yanuardi, Muhammad Hasmi & Firdaus, Ahmad Musyalen. "Tragedi 13 1969 dalam Berbagai Perspektif" Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 12 No. 1 Januari 2023: 74-96.
<https://doi.org/10.21009/JPS.121.04>

Malaysia". Accessed June 24, 2025.
<https://www.files.ethz.ch/isn/45937/7.pdf>

NEWS OR MAGAZINE ARTICLE

Kuswantoro, Dimas. "Kilas Balik Kerusuhan Berbau Rasial 13 Mei 1969 di Malaysia". Tempo, May 13, 2024.
<https://www.tempo.co/internasional/kilas-balik-kerusuhan-berbau-rasial-13-mei-1969-di-malaysia-59534>

Tasropi. "Seri Sejarah Dunia, Insiden 13 Mei 1969, Kerusuhan Rasial Terjadi di Malaysia Sampai Mengundang Reaksi Kemarahan Orang Singapura". Radar Semarang, May 13, 2024.
<https://radarsemarang.jawapos.com/kazanah/724645594/seri-sejarah-dunia-insiden-13-mei-1969-kerusuhan-rasial-terjadi-di-malaysia-sampai-mengundang-reaksi-kemarahan-orang-singapura?page=3>

WEBSITE CONTENT

Noor, Noraini M. "Multicultural Policies in Malaysia: Challenges, Successes, and the Future". Accessed June 20, 2025.
<https://gjia.georgetown.edu/2024/06/01/multicultural-policies-in-malaysia-challenges-successes-and-the-future/>

Samsul, A. B. "Unity in Diversity: The Malaysian Experience". Accessed May 11, 2025.
https://www.academia.edu/10432366/Unity_in_Diversity_The_Malaysian_Experience

Sundaram, Jomo K. "The New Economic Policy and Interethnic Relations in